

URGENSI PENAMBAHAN ANGGARAN PERTAHANAN TAHUN 2024

Aulia Fitri*

1

Abstrak

Pemerintah menyepakati penambahan anggaran Kementerian Pertahanan untuk periode 2020-2024 sebesar 20%, dari US\$20,75 miliar menjadi US\$25 miliar yang berasal dari pinjaman luar negeri. Penambahan anggaran ini ditujukan untuk pembelanjaan alutsista TNI oleh Kementerian Pertahanan. Keputusan ini menimbulkan diskursus publik, terutama mengenai prioritas dan transparansi atas penambahan anggaran pertahanan dalam jumlah yang signifikan. Tulisan ini menganalisis urgensi kenaikan anggaran Kementerian Pertahanan tahun 2024. Setidaknya ada tiga faktor utama yang mendorong keputusan pemerintah dalam penambahan anggaran belanja alutsista Kementerian Pertahanan. Pertama, pemenuhan target MEF tahun 2024. Kedua, komitmen keberlanjutan pembayaran pinjaman luar negeri terhadap pengadaan alutsista impor. Ketiga, respons terhadap dinamika geopolitik global. Penting bagi Komisi I DPR RI melalui fungsi pengawasan untuk mendorong transparansi penggunaan anggaran Kementerian Pertahanan terhadap sistem pengadaan alutsista TNI. Komisi I DPR RI juga dapat mendorong pembelian alutsista baru, serta mendorong maksimalisasi transfer of technology dalam skema kerja sama luar negeri.

Pendahuluan

Kementerian Keuangan dan Presiden RI menyepakati penambahan anggaran Kementerian Pertahanan tahun 2024 sebesar US\$4 miliar atau setara Rp61,58 triliun yang bersumber dari pinjaman luar negeri untuk pembiayaan belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista). Anggaran yang sudah disiapkan

untuk sektor pertahanan antara 2020 dan 2024 semula US\$ 20,75 miliar, setelah penambahan menjadi US\$25 miliar (kompas.id, 2 Desember 2023). Koalisi masyarakat sipil untuk reformasi keamanan menyatakan kekhawatiran terjadinya politisasi serta sulitnya mengukur efektivitas kenaikan anggaran pertahanan di penghujung masa pemerintahan

* Analis Legislatif Ahli Muda, Bidang Politik Hukum dan Keamanan, pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, email: aulia.fitri@dpr.go.id.



yang akan berakhir pada 2024 (news.detik.com, 2 Desember 2023). Di lain pihak, Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa penambahan anggaran belanja alutsista bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan telah melalui proses perencanaan yang cukup lama. Penambahan ini diklaim sesuai dengan rencana strategis (renstra) sektor pertahanan, yang terbagi menjadi 3 renstra hingga 2034 mencapai US\$55 miliar (tempo.co, 12 Desember 2023).

Pembiayaan belanja alutsista, sebagai bagian dari pembangunan postur militer yang ideal telah menjadi salah satu agenda penting di bidang pertahanan. Upaya tersebut diimplementasikan pemerintah melalui kebijakan *Minimum Essential Forces* (MEF) yang mulai dilaksanakan sejak 2010 dan ditargetkan rampung pada 2024 (Budiman dkk, 2021:55). Dukungan anggaran yang berkelanjutan menjadi faktor penting, mengingat pemenuhan alutsista TNI masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas dalam mewujudkan kekuatan pokok minimum komponen utama pertahanan negara. Tulisan ini menganalisis urgensi penambahan anggaran Kementerian Pertahanan

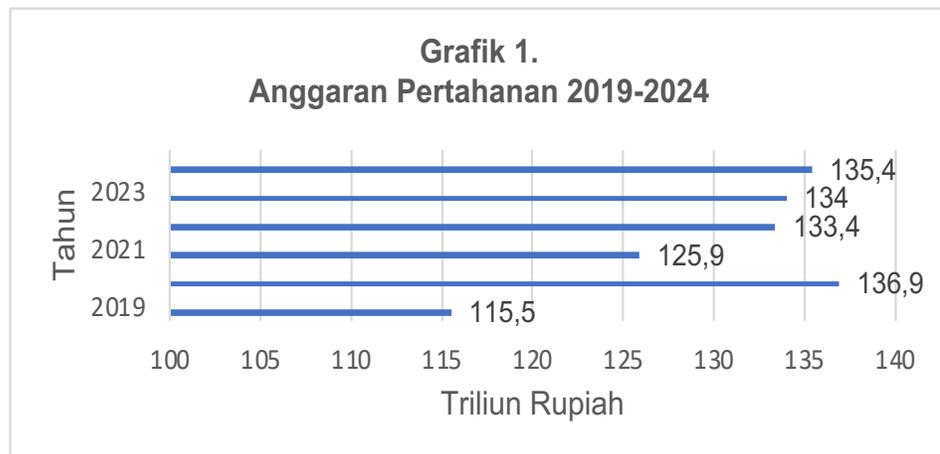
dalam pemenuhan belanja alutsista TNI.

Dukungan Anggaran Pembangunan Sektor Pertahanan

Sektor pertahanan cukup mendapatkan perhatian besar dari pemerintah dari tahun ke tahun, setidaknya sejak tahun 2019. Besarnya alokasi untuk anggaran pertahanan kemudian menimbulkan diskursus di mana hal tersebut dipertanyakan di tengah kondisi pemulihan perekonomian Indonesia. Anggaran Kementerian Pertahanan Indonesia menjadi salah satu yang mendapat alokasi terbesar dari APBN dan cenderung mengalami peningkatan sebagaimana yang tersaji dalam grafik di bawah ini.

Berdasarkan Gambar 1, dapat dilihat bahwa anggaran pertahanan Indonesia mengalami kecenderungan peningkatan signifikan dari tahun 2019 ke 2020, walaupun sempat turun di tahun 2021 akibat *refocusing* anggaran pada masa pandemi Covid-19 (cnbcindonesia.com, 28 desember 2020). Tahun 2022 hingga 2024, anggaran pertahanan yang bersumber dari APBN terus

Gambar 1. Anggaran Pertahanan 2019-2024



Sumber: Berbagai sumber diolah, 2020-2023.

mengalami peningkatan. Tahun 2024, alokasi anggaran pertahanan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. RAPBN 2024 sebelumnya mengalokasikan anggaran Kementerian pertahanan sebesar Rp135,4 triliun. Dalam perkembangannya, pada akhir November 2023, pemerintah menyepakati penambahan Rp61,58 triliun atas anggaran pertahanan yang bersumber dari pinjaman luar negeri (tempo.co, 12 Desember 2023).

Alokasi anggaran untuk Kementerian Pertahanan yang cenderung meningkat menimbulkan kritik di tengah pemulihan kondisi perekonomian Indonesia. Kritik terhadap besaran anggaran pertahanan yang dialokasikan oleh pemerintah pada dasarnya merupakan hal yang wajar terutama dalam pemerintahan demokratis. Pertimbangan pembangunan persenjataan dan pembangunan kesejahteraan (*guns versus butter*), kembali pada prioritas pembangunan yang hendak dilakukan oleh suatu negara (Carter, Ondercin & Palmer, 2021: 148). Dengan kata lain, alokasi anggaran yang cukup besar pada sektor pertahanan berkaitan erat dengan pandangan pemerintah atas pentingnya meningkatkan kekuatan dan kesiapan TNI agar mampu menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa Indonesia.

Urgensi Penambahan Anggaran

Pencapaian postur pertahanan yang ideal membutuhkan komitmen berkelanjutan, termasuk dalam hal dukungan anggaran. Pembangunan modernisasi alutsista pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan kepentingan pembangunan

pertahanan negara dalam rangka mewujudkan postur ideal TNI, yang dapat berubah dengan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika ancaman.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor pertahanan Indonesia, khususnya dalam hal persenjataan masih belum optimal. Ada kesenjangan antara kondisi alutsista yang dimiliki dengan kebutuhan yang ditargetkan dalam postur ideal. Anggaran belanja pertahanan negara tidak seluruhnya dialokasikan untuk modernisasi alutsista, tetapi juga untuk dukungan manajemen, kebijakan dan regulasi pertahanan, kesejahteraan prajurit, pelaksanaan tugas TNI, dan pembinaan sumber daya pertahanan. Penambahan alokasi anggaran belanja alutsista dapat memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan modernisasi alutsista TNI dan melanjutkan komitmen kontrak pembiayaan persenjataan melalui skema pinjaman luar negeri.

Secara jangka panjang, pemerintah telah menerapkan kebijakan MEF yang bersifat *multi-years* dan terbagi dalam tiga renstra untuk mewujudkan kekuatan pokok minimum komponen utama pertahanan negara. Secara terperinci, capaian modernisasi alutsista pada program MEF dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Berdasarkan Tabel 1, saat ini MEF tengah memasuki renstra III (2020-2024). Capaian total MEF TNI pada renstra II (2015-2019) sebesar 63,19% dengan target pencapaian fisik sebesar 75,54%, masih ada selisih yang cukup besar di angka 12,35%. Meskipun demikian, konsistensi kenaikan anggaran pertahanan dalam

Tabel 1. Capaian MEF TNI 2009-2024

Renstra	Target	Capaian
MEF I (2010-2014)	57,24%	54,97%
MEF II (2015-2019)	75,54%	63,19%
MEF III (2020-2024)	100%	Belum Terhitung

Sumber: Kementerian Pertahanan, 2022.

beberapa tahun terakhir belum dapat mengakomodasi modernisasi alutsista TNI. Hal tersebut menunjukkan, masih ada keterbatasan dalam pemenuhan alutsista untuk menopang postur pertahanan negara. Keputusan pemerintah dalam meningkatkan anggaran pertahanan dapat dilihat sebagai upaya pemenuhan target penyelesaian program MEF pada 2024.

Dalam pemenuhan target MEF, belanja alutsista TNI banyak diakomodasi oleh skema pinjaman luar negeri dengan pembayaran jangka panjang. Beberapa kontrak yang telah berjalan di antaranya: pembangunan pesawat tempur KFX/IFX dengan Korea Selatan, pengadaan 24 unit jet tempur Rafale dari Perancis, jet tempur Mirage 2000-5 dari Qatar, F-15 dari Amerika Serikat, dan Submarine Rescue Vehicle dari Inggris (bbc.com, 4 Desember 2023). Tambahan anggaran pertahanan dapat dialokasikan untuk melanjutkan komitmen pembayaran kontrak pengadaan senjata, baik yang sudah berjalan maupun yang akan direncanakan.

Belum terpenuhinya postur kekuatan komponen utama berpengaruh terhadap kapabilitas pertahanan negara dalam menghadapi berbagai ancaman yang terus berkembang. Kondisi geopolitik global yang saat ini bergerak secara dinamis

dan fluktuatif seperti ketegangan antara China dan Filipina di Laut China Selatan, peningkatan aktivitas militer China di Selat Taiwan, serta peperangan yang terjadi di Gaza dan Ukraina, menuntut kesiapan postur pertahanan yang ideal untuk mengantisipasi eskalasi ancaman. Penambahan anggaran pertahanan dapat dilihat sebagai langkah pemerintah dalam merespons dinamika geopolitik global dalam setahun terakhir.

Penutup

Penambahan anggaran pertahanan untuk belanja alutsista dapat dilihat sebagai keputusan pemerintah dalam memprioritaskan kapabilitas komponen utama pertahanan negara. Ada tiga hal yang mendorong keputusan tersebut. *Pertama*, pemenuhan target penyelesaian program MEF yang ditargetkan selesai tahun 2024. *Kedua*, melanjutkan komitmen untuk pembayaran pengadaan alutsista melalui skema pinjaman luar negeri. *Ketiga*, penguatan kapabilitas dan kesiapan (*readiness*) komponen utama pertahanan sebagai respons terhadap kondisi geopolitik global.

Dalam mendukung hal ini, penting bagi Komisi I DPR RI melalui fungsi pengawasan untuk terus mendorong transparansi

dan pencegahan korupsi dalam sistem pengadaan alutsista TNI di lingkungan Kementerian Pertahanan. Komisi I DPR RI juga dapat mendorong pengadaan alutsista baru (bukan bekas), serta mengedepankan *transfer of technology* khususnya dalam pembangunan alutsista jangka panjang.

Referensi

- "Alokasi Anggaran Pertahanan Terganjil Covid-19", *cncindonesia.com*, 28 Desember 2020, <https://www.cncindonesia.com/opini/20201228134247-14-211927/alokasi-anggaran-pertahanan-terganjal-covid-19>, diakses 10 Desember 2023.
- "Alokasi Utang Belanja Alutsista Naik", *bbc.com*, 4 Desember 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cekp5rzd9xo>, diakses 10 Desember 2023.
- "Anggaran Kemenhan 2024 Naik Jadi Rp 386 Triliun, Ini Kata Sri Mulyani", *tempo.co*, 12 Desember 2023, <https://bisnis.tempo.co/read/1808581/anggaran-kemenhan-2024-naik-jadi-rp-386-triliun-ini-kata-sri-mulyani>, diakses 12 Desember 2023.

Budiman, Ahmad dkk. 2021. *Pembangunan Kekuatan Minimum Komponen Utama Pertahanan Negara di Era New Normal*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.

Carter, J.; Ondercin, H. L.; dan Palmer, G. 2021. Guns, Butter, and Growth: The Consequences of Military Spending Reconsidered. *Political Research Quarterly*, 74(1), 148-165. <https://doi.org/10.1177/1065912919890417>

"Dianggap Tak Lazim, Tambahan Belanja Alutsista Rp61,7 Triliun Dipertanyakan", *Kompas.id*, 2 Desember 2023. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/12/01/tambahan-belanja-alutsista-rp-617-triliun-dinilai-tidak-lazim>, diakses 10 desember 2023.

"Pemerintah Diminta Tunda Kenaikan Anggaran di Kemenhan untuk 2024", *news.detik.com*, 2 Desember 2023. news.detik.com/berita/d-7068918/pemerintah-diminta-tunda-kenaikan-anggaran-di-kemenhan-untuk-2024, diakses 10 Desember 2023.